

MENGGUGAT PEMENUHAN KEWAJIBAN KONSTITUSIONAL: WAJIB BELAJAR

**KOALISI MASYARAKAT SIPIL
PEMANTAU PENDIDIKAN**

*Disampaikan pada rapat dengar pendapat
dengan Panja Pembiayaan Pendidikan di DPR RI,
20 Agustus 2024*



UUD 1945: Wajib Belajar dan Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan

- Pasal 31**
- ayat 1** Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan
 - ayat 2** Setiap warga negara **wajib** mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah **wajib** membiayainya
 - ayat 4** Negara **memprioritaskan** anggaran pendidikan **sekurang-kurangnya 20% dari APBN serta dari APBD** untuk memenuhi kebutuhan **penyelenggaraan pendidikan nasional**

UU 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pasal 34 ayat 2

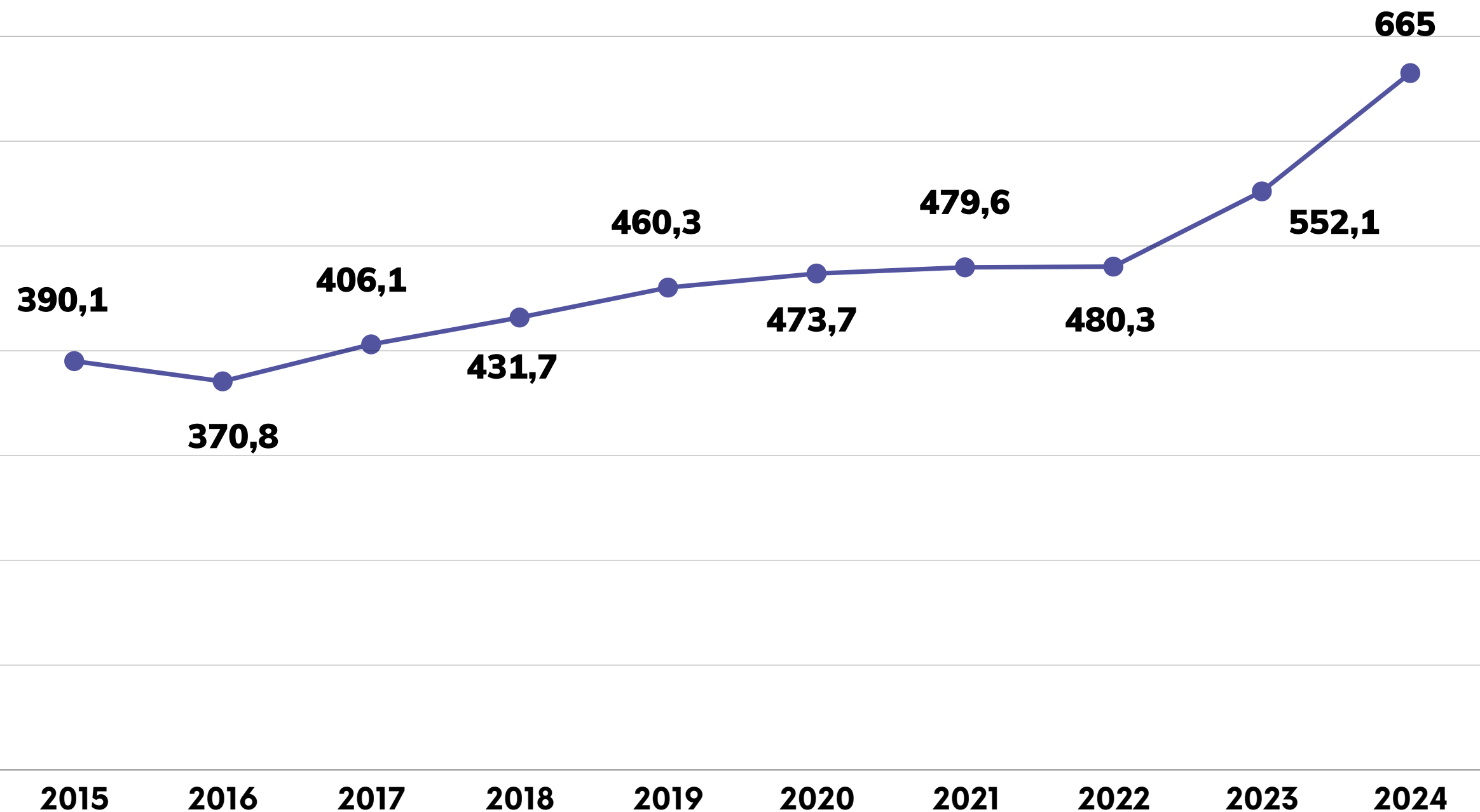
Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

Pasal 49 ayat 1

Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

APBN untuk Pendidikan 2015-2024

Kemenkeu, 2016-2024 (Dalam Triliun)



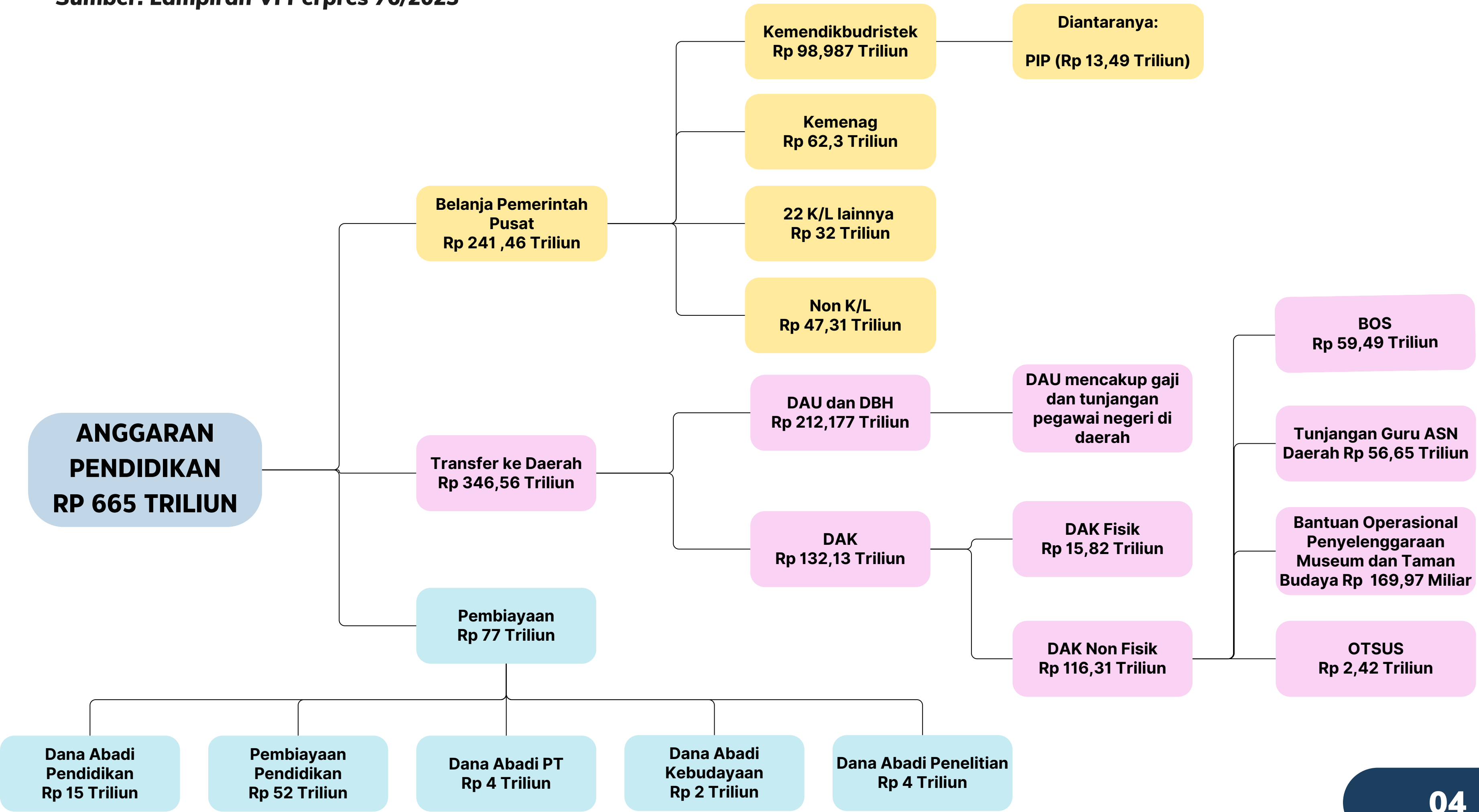
Sudah Melebihi Mandat Minimal 20% (APBN), Bagaimana Distribusi Alokasinya?

Seharusnya...

- Diprioritaskan untuk menjawab amanat UUD 1945 dan UU Sisdiknas
- Prioritas lainnya:
 - Peningkatan akses:
 - Misalnya: naik kelas ke pendidikan menengah dan tinggi
 - Peningkatan kualitas

Faktanya...

- Pendidikan dasar tidak sepenuhnya bebas biaya:
 - Kursi sekolah negeri tidak cukup, sekolah swasta berbiaya (terjadi diskriminasi akses wajib belajar)
 - **Memicu polemik-kecurangan PPDB**
- Anggaran pendidikan TIDAK diprioritaskan untuk penyelenggaraan wajib belajar!

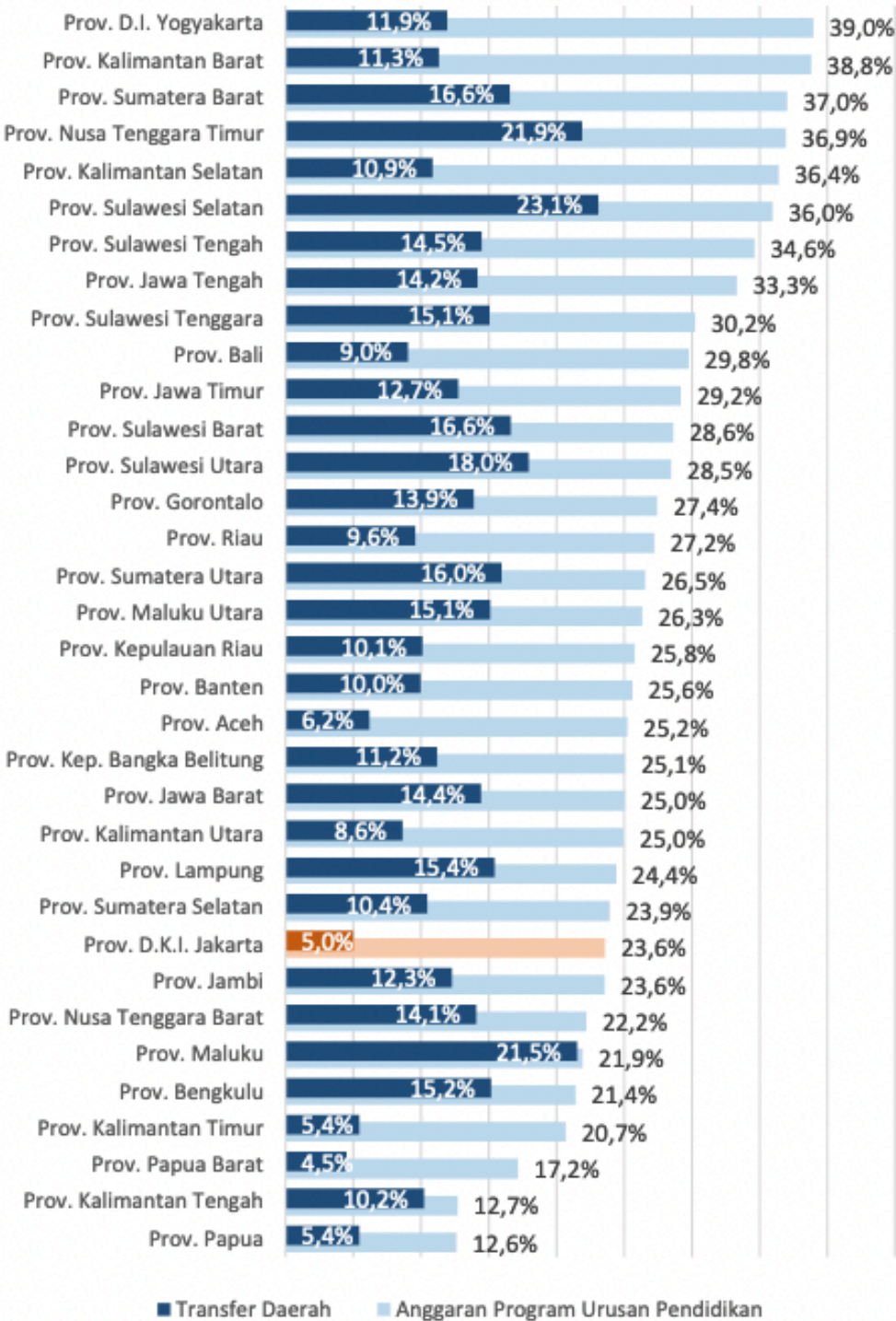


DUA PENGABAIAAN (MENDASAR) UU SISDIKNAS:

- Pendidikan dasar disertai pungutan biaya
 - Bukan karena anggaran tidak mencukupi, melainkan penganggaran yang tidak didasarkan pada **PRIORITAS UTAMA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**.
- Anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN digunakan untuk pembiayaan “**PENDIDIKAN KEDINASAN**”

Catatan Atas Alokasi Anggaran Pendidikan (Min) 20%

ANGGARAN PROGRAM URUSAN PENDIDIKAN (DINAS PENDIDIKAN)



Sumber: Kementerian Keuangan, Mei 2022

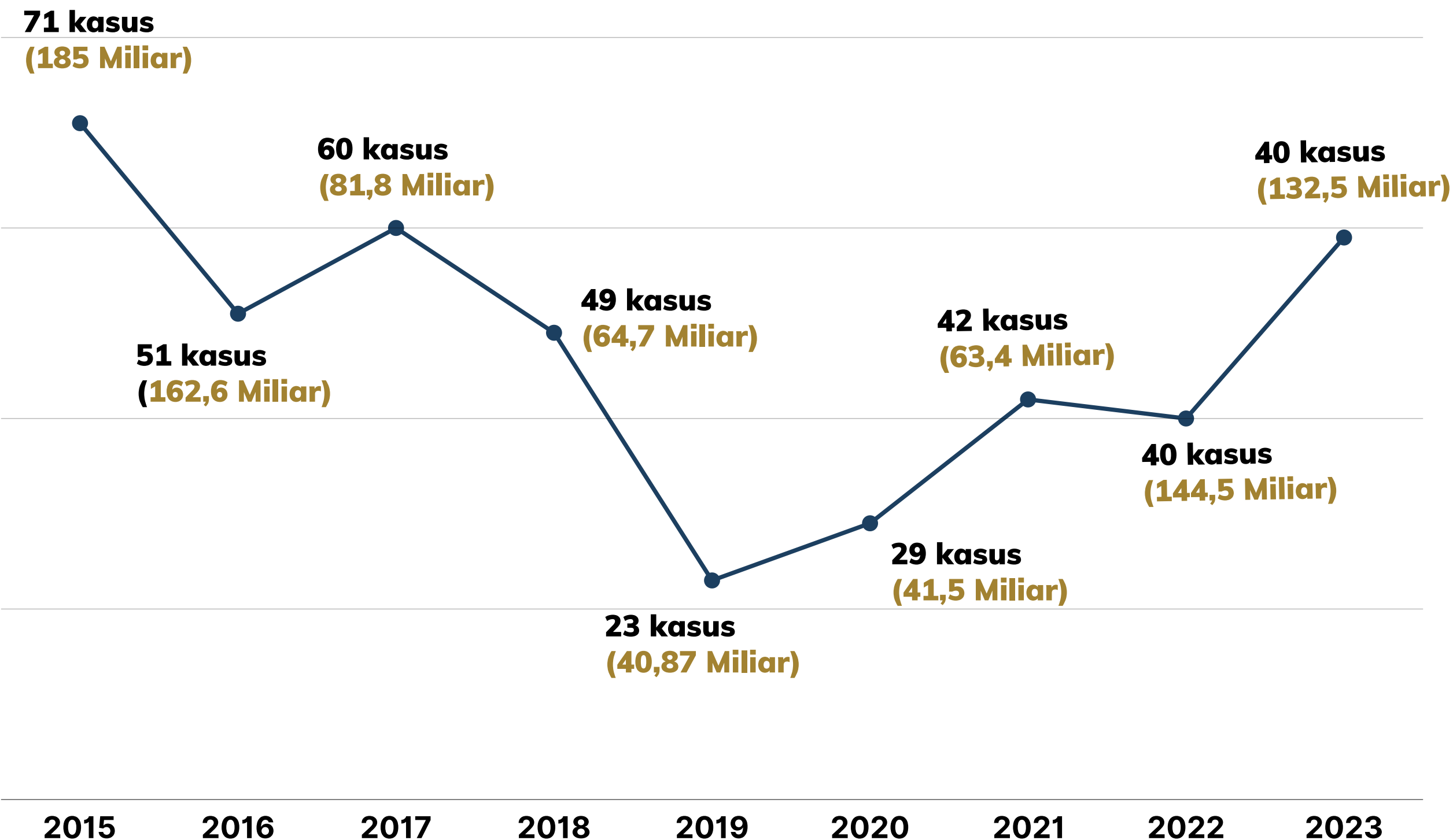
- **Pusat-Daerah:**
 - **Pusat:** Asal memenuhi minimal 20%
 - **Daerah:** Masih banyak daerah yang belum memenuhi kewajiban 20% APBD untuk pendidikan
- **Pusat:**
 - Rp 80,17 Triliun (>12%) anggaran pendidikan yang dikelola pemerintah pusat tersebar di 22 K/L dan Non K/L yang tidak menyelenggarakan wajib belajar
 - Rp 32,8 Triliun di 22 K/L selain Kemendikbudristek dan Kemenag
 - Rp 47,3 Triliun untuk belanja Non K/L
- Tidak hanya soal belanja pendidikan tidak prioritas, terjadi pula:
 - Pemborosan belanja anggaran negara
 - Ketidakadilan anggaran pendidikan pada kelompok rentan
 - Tidak sesuai kebutuhan
 - Korupsi

Top 10 Pengadaan Kemendikbudristek TA 2022 dan 2023

opentender.net Membuka Data Mencegah Korupsi Beranda Pemantauan Dashboard Red-Flag Login				
Top 10 Pengadaan dengan Nilai Kontrak Tertinggi Tahun 2023				
Skor	Judul Tender	Penyedia	Pengumuman	Kontrak
57	Pengembangan Platform Digital Pendidikan 2023	PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.	02 December 2022	Rp 422.334.272.970,00
71	Pembangunan Kampus Baru Politeknik Maritim Negeri Indonesia (Polimarin) Tahun Anggaran 2023	PT BRANTAS ABIPRAYA (Persero)	30 December 2022	Rp 122.058.694.224,80
61	Paket Pekerjaan Konstruksi CWI-02: Automotive Center, Gedung Powerhouse, ICT Robotics, Maritime Center, Creative Cente	PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk	27 April 2023	Rp 97.222.888.000,00
43	Tender Konstruksi Kawasan Kantor LLDIKTI XIV Biak	PT.PERISAI PRIBUMI	03 December 2022	Rp 92.214.596.834,69
71	Paket Pekerjaan Konstruksi CWI-01: Construction of ITS Tower, CLC, and Supporting Infrastructure	PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk	25 May 2023	Rp 86.951.148.000,00
57	Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu II Institut Teknologi Kalimantan	PT. RANCANG BANGUN MANDIRI	21 March 2023	Rp 69.712.903.500,00
64	Pengadaan Konstruksi Gedung Kuliah Terpadu (GKT)	PT. KEMBAR JAYA ABADI	05 January 2023	Rp 64.000.243.200,00
57	Pembangunan Gedung Satu Gurindam-Pusat Layanan Akademik Cerdas Terintegrasi	PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA	27 January 2023	Rp 57.147.741.175,61
50	Pembangunan Gedung Laboratorium Riset Terpadu UPN Veteran Yogyakarta 2023	PT PERMATA ANUGERAH YALAPERSADA	21 December 2022	Rp 55.777.777.777,00
32	Pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Jurusan Kemaritiman Polnes TA.2023	PT. ZEIN ANUGERAH PERKASA	21 March 2023	Rp 55.480.000.000,00
Resiko Tinggi Resiko Sedang Resiko Rendah				

opentender.net Membuka Data Mencegah Korupsi Beranda Pemantauan Dashboard Red-Flag Login				
Top 10 Pengadaan dengan Nilai Kontrak Tertinggi Tahun 2022				
Skor	Judul Tender	Penyedia	Pengumuman	Kontrak
64	CWJ-02: Construction of 6 (six) Buildings consist of: Integrated classroom A Mendalo, Integrated classroom B Mendalo,Integrated Classroom C Mendalo, Engineering Science Laboratory, Integrated Social Science Laboratory, Student Activity Centre, AKSI-ADB University of Jambi	PT. NINDYA KARYA (Persero)	14 June 2022	Rp 239.378.125.000,00
57	Pembangunan Digital Learning Center Building Universitas Sumatera Utara 2022	PT. TURELOTO BATTU INDAH	25 March 2022	Rp 138.501.537.851,67
75	Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Terpadu Psikologi Olahraga	PT. NINDYA KARYA (Persero)	31 January 2022	Rp 120.140.000.000,00
71	Pengadaan Pembangunan Konstruksi Gedung Science Techno Park Universitas Indonesia	PT. PP (Persero) Tbk	01 January 1970	Rp 116.453.612.250,68
61	Pembangunan Gedung Laboratorium Teknik (GLT) 4 dan Pembangunan Gedung Kuliah Umum (GKU) 2 ITERA	PT BRANTAS ABIPRAYA (Persero)	22 December 2021	Rp 100.907.879.599,99
79	Pembangunan Gedung Smart Automation Workshop	PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk	28 March 2022	Rp 98.504.947.000,00
50	Alat Laboratorium Analisis Konservasi Cagar Budaya	SAPTA KARYA ABADI	30 June 2022	Rp 91.552.252.121,02
46	Pekerjaan Fisik Pembangunan Gedung Kantor dan Sarana Lainnya LLDIKTI Wilayah XIII	PT. TURELOTO BATTU INDAH	15 April 2022	Rp 87.453.570.732,99
36	Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Pusat Informasi dan Perpustakaan Universitas Negeri Padang	PT. NUSA KONSTRUKSI ENJINIRING Tbk	14 June 2022	Rp 82.780.488.268,84
36	Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Polines	PT. JAYA ARNIKON	25 January 2022	Rp 82.153.329.000,00
Resiko Tinggi Resiko Sedang Resiko Rendah				

Penindakan Korupsi Sektor Pendidikan oleh APH Pada 2015-2023



**424 kasus dengan
potensi kerugian
negara Rp 916,87 Miliar**

Sumber: Tren Penindakan Korupsi
(ICW, 2016-2024)

Penindakan Korupsi Sektor Pendidikan oleh APH Pada 2016-2023

- **Dari jumlah kasus yang ditindak APH:**
 - **Apa yang paling sering dikorupsi?**
 - **Dana BOS**
 - **Pengadaan Infrastruktur (Termasuk yang bersumber dari DAK fisik)**
 - **Pengadaan Non Infrastruktur (Barang)**
 - **Modus umum:**
 - **Kegiatan/ proyek/ laporan fiktif**
 - **Penyalahgunaan anggaran**
 - **Mark up**
 - **Pungli/ pemerasan**
- **Dampak korupsi pendidikan:**
 - **Memperparah kemajuan pelayanan pendidikan, melanggengkan kesenjangan akses-mutu pendidikan**
 - **Inefisiensi anggaran pendidikan**
 - **Kerugian negara, belanja tidak sesuai kebutuhan = belanja tidak bermanfaat**
 - **Berpotensi besar melahirkan generasi yang permisif terhadap korupsi**



Proyek Sekolah Merah Putih NTT: Plafon Ambruk, Tembok Kelas Retak, hingga Toilet yang Rusak

Proyek Pemerintah yang Beresiko Kecurangan?

Foto: ICW & Kjub Jurnal Investigasi (KJI)



Proyek “Sekolah Merah Putih”
Kementerian PUPR (Satker
Pelaksanaan Prasarana
Permukiman Wilayah I NTT)
senilai Rp 43 Miliar (18
sekolah)



Kondisi menyedihkan tersorot pada beberapa sekolah di Pulau Rote, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur.

Berdasarkan temuan ICW di [Opentender.net](https://opentender.net), proyek “Sekolah Merah Putih” ini beresiko terjadi kecurangan.



Foto: Kjub Jurnal Investigasi (KJI)



Tak kunjung dibenahi oleh pemerintah, beberapa sekolah di sini sampai menggunakan dana BOS dan sumbangan orang tua untuk perbaikan.

Sumber: Liputan KJI NTT



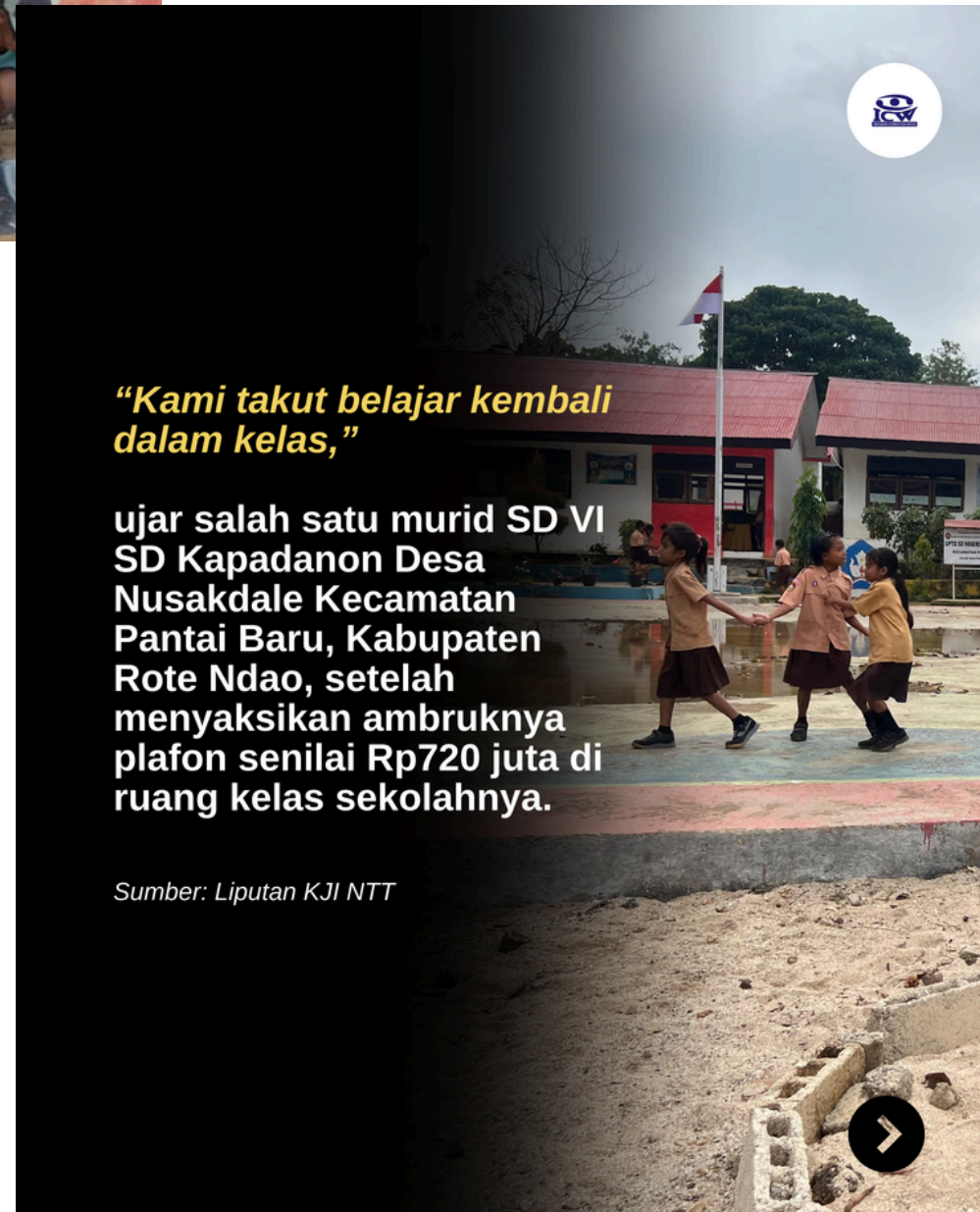
Foto: Kjub Jurnal Investigasi (KJI)



“Kami takut belajar kembali dalam kelas,”

ujar salah satu murid SD VI SD Kapadanon Desa Nusakdale Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao, setelah menyaksikan ambruknya plafon senilai Rp720 juta di ruang kelas sekolahnya.

Sumber: Liputan KJI NTT



2 JUDICIAL REVIEW UU SISDIKNAS



Kewajiban Konstitusional

UUD 1945 Pasal 31:

- (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Pasal 34 UU Sisdiknas:

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.”

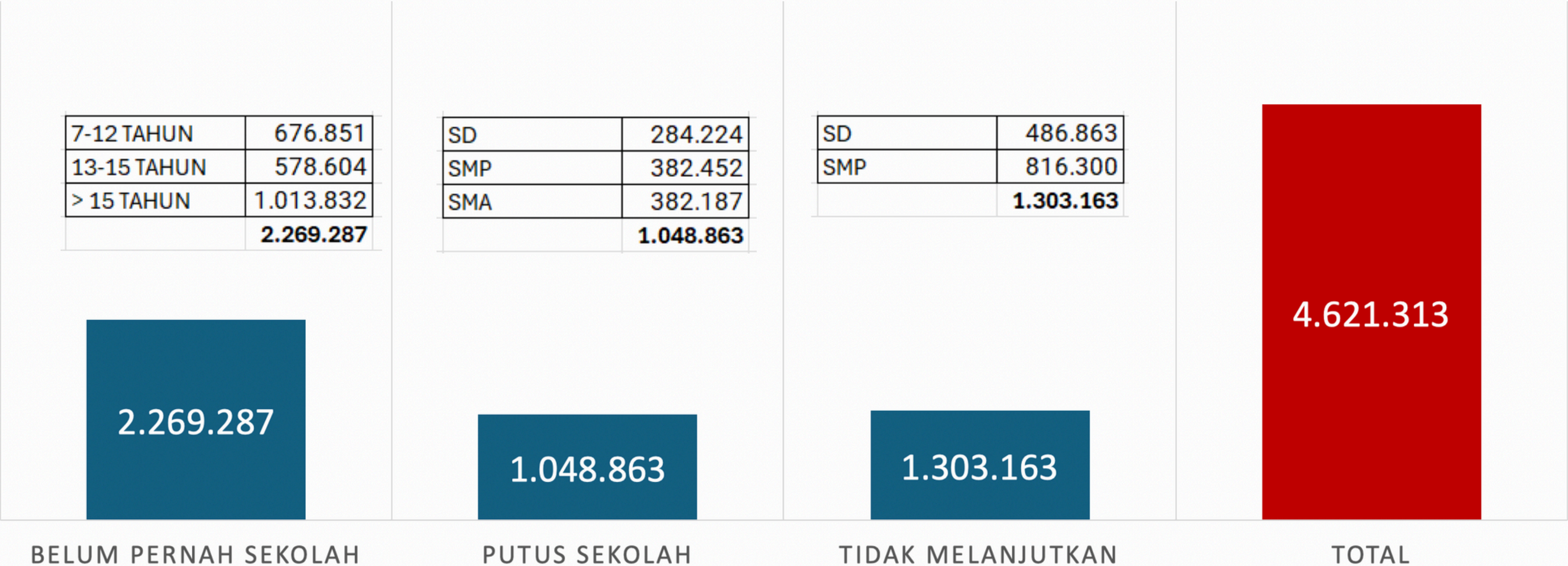
***PENDIDIKAN DASAR MASIH BERBAYAR!
Jadi, frasa “wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya” dalam UU Sisdiknas telah menimbulkan ketidakpastian hukum!***



Perkembangan JR

- Dalam keterangannya yang disampaikan di MK, TERMOHON hanya menjelaskan perihal 20% anggaran APBN untuk pendidikan (Pasal 31 ayat 3 UUD 1945).
 - TERMOHON belum menjelaskan pelaksanaan kewajibannya atas pendidikan dasar yang tanpa memungut biaya (Pasal 31 ayat 2 UUD 1945).
- Akibat dari pengabaian kewajiban pemerintah untuk membiayai pendidikan dasar 9 tahun:
 - Masih tingginya jumlah anak usia sekolah SD s/d SMP yang tidak bersekolah.

POTRET ANAK TIDAK SEKOLAH 2024



SUMBER: PD.DATA.KEMENDIKBUD, AGUSTUS 2024.

Perkembangan JR

- TERMOHON selalu berdalih bahwa anggaran TIDAK CUKUP untuk memenuhi kewajibannya membiayai pendidikan dasar sesuai Pasal 31 ayat 2 UUD 1945 dan Pasal 34 ayat 2 UU Sisdiknas tentang pembiayaan PENDIDIKAN DASAR.
- Benarkah anggaran negara dan daerah tidak cukup?

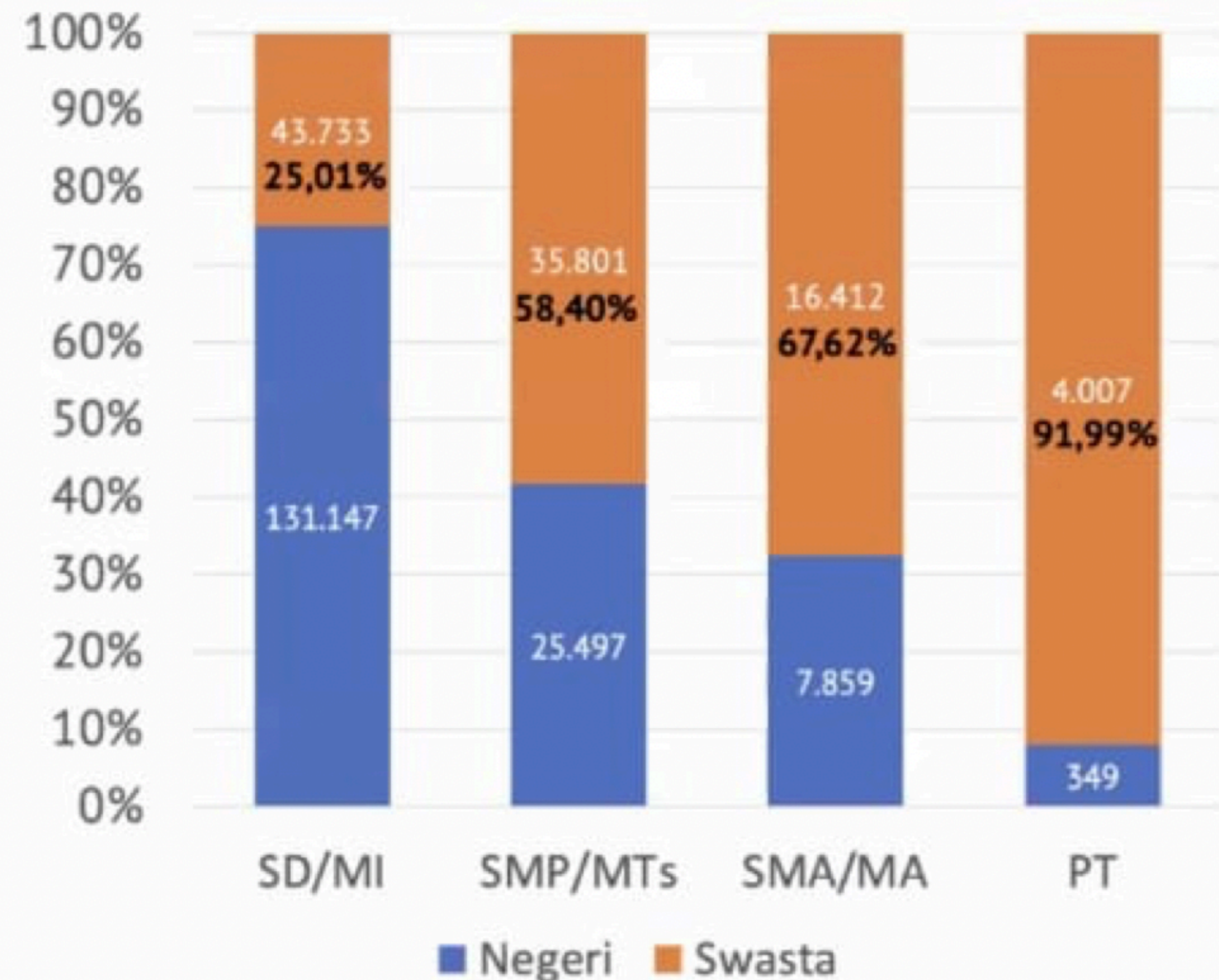
VERSI PENGHITUNGAN	JUMLAH BIAYA TAMBAHAN
KEMENDIKBUDRISTEK	418 TRILIUN (SD-SMP)
BAPPENAS	200 JUTA/ANAK
KOALISI MASYARAKAT SIPIL	84 TRILIUN (SD-SMP-SMA)

PENGHITUNGAN VERSI KOALISI MASYARAKAT SIPIL

• ...

1. Berbasis pada hak anak dalam pendidikan (*no one left behind*).
2. Menggunakan sistem Public Private Partnership (PPP), atau pelibatan sekolah swasta sejak dalam proses PPDB.
3. Membedakan jumlah besaran dana BOS di negeri dan di swasta.

LEMBAGA PENDIDIKAN NEGERI DAN SWASTA



Catatan:
Persentase berdasar cacah lembaga. Diolah dari data BPS (2023)

Rekomendasi

- **Evaluasi dan Pembenahan Penganggaran Pendidikan:**
 - Audit menyeluruh anggaran fungsi pendidikan
 - Ada koordinasi terpusat mengenai perencanaan, pengelolaan, pengawasan, dan evaluasi penggunaan anggaran fungsi pendidikan. Persoalan dan rekomendasi yang sama juga terkait anggaran pendidikan di daerah.
 - Menjadikan PENDIDIKAN DASAR (kewajiban konstitusional) sebagai prioritas utama dan dilanjutkan ke PENDIDIKAN MENENGAH serta PENDIDIKAN TINGGI
 - Memfokuskan penggunaan anggaran minimal 20% untuk pendidikan: AKSES dan KUALITAS
- **Pembenahan mekanisme pengawasan oleh DPR RI dan DPRD**
- **Meningkatkan pengelolaan anggaran dan pengadaan pendidikan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel:**
 - Optimalisasi peran publik untuk berpartisipasi mengawal pendidikan.